**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.  Latar Belakang Masalah**

Seringkali dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan atau cita-cita yang optimis sifatnya. Pandangan atau cita-cita tersebut pada umumnya hendak diwujudkan dalam usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan material dan spiritual yang lebih baik dari pada keadaan yang telah dicapai. Pembangunan tersebut timbul antara lain, karena para warga masyarakat beserta pemimpin-pemimpin negara-negara yang merdeka sesudah perang dunia ke 11, mempunyai keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk dapat hidup sederajat dengan masyarakat-masyarakat dari Negara-negara yang dikualisifikasikan sebagai Negara-negara yang telah kompleks dan modern.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menaikkan taraf atau tingkat hidup, dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan. Karena mutu hidup dapat di artikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Jadi, didalam konsep pembangunan termasuk usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dengan demikian, pembangunan dapat di kategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (‘’perubahan berencana’’). Perubahan berencana adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan tersebut. Pembangunan mencakup konsep yang amat luas. Ia dapat mengenai apa saja, termasuk didalamnya ekonomi, politik, kebudayaan, hukum dan sebagainya. Namun, di dalam konsep pembangunan terkandung unsur prioritas dan masing-masing masyarakat memberi tekanan hanya pada satu atau beberapa di bidang kehidupan manusia. Akan tetapi, kebanyakan dari masyarakat lebih memberikan prioritas pada satu bidang saja, yaitu pembangunan bidang ekonomi. Negara kita (Indonesia) misalnya, melalui kabupaten rakyatnya, telah menetapkan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri- sedangkan pembangunan bidang lainnya seperti politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain juga lebih ditingkatkan agar sepadan dan dapat menunjang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi(Tap MPR NO. II/MPR/1983). (Soleman.1984 ; 159)[[1]](#footnote-2)

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan.

Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan, yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan, karena pembangunan itu semestinya bersifat komprehensif yaitu mencakup pembangunan manusia dan lingkunganya.[[2]](#footnote-3)

Kabupaten Bima yang dikenal sekarang ini sebelum di bentuk menjadi daerah Kabupaten dengan undang-undang Nomor: 69 Tahun 1958 sebagai salah satu daerah Kabupaten Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah suatu daerah yang berasal dari daerah Swarpraja Kesultanan Bima. Swapraja adalah nama yang diberikan oleh perundang-undangan Republik Indonesia kepada daerah atau wilayah yang sebelum Proklamasi Kemerdekaan digolongkan di dalam wilayah yang disebut dengan *Zelfregerende Gebiedsdelen* atau disebut dengan daerah *Landschop*. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wilayah yang berpemerintahan sendiri.

Pada pemerintahan Hindia Belanda diketahui ada dua macam *Zelfregerend Gebiedsdelen* yaitu :

1. Yang ditemukan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia sebagai susunan masyarakat otonom yang tunduk pada Hukum Adat, dinamakan *Inbeemse Zelfregerende Gebiedsdelen* atau wilayah pribumi yang berpemerintah sendiri.
2. Yang dibentuk oleh pemerintah Belanda: daerah-daerah ini disebut *Gedecentraliseerde Zelfregerende Gebiedsdelen* atau daerah desentralisasi yang berpemerintah sendiri [[3]](#footnote-4)

Pada Pemilihan umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) kabupaten Bima tahun 2005, putra mahkota mantan perintis dan pendiri wilayah pemerintahan Dana Mbojo Sultan Abdul Kahir yaitu Ferry Zulkarnain terpilih sebagai Bupati Bima dan pasangannya menjadikan mereka sebagai Bupati Bima pertama dalam sejarah pemerintahan Bima dipilih langsung oleh rakyat Bima.

Putra mahkota Sultan Abdul Kahir, Ferry Zulkarnain yang berpasangan dengan Usman AK mengalahkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima lainnya. Satu dari pasangan yang dikalahkan tokoh politik partai Golongan Karya (Golkar) di Dana Mbojo ini adalah *incumbent*. Zainul Arifin yang perpasangan dengan dr. Ibrahim saat itu merupakan Bupati Bima.

Enam nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima periode tahun 2005 - 2010 dnegan nomor urut:

1. H. Najamuddin, SE - Ir. H. Syafruddin, AM
2. H. Abdul Chair, SH, M.Si - Drs. Masykur HMS
3. H. Thamrin Ismail, MM, MBA - Dra. Evi Nafisah
4. Ferry Zulkarnain, ST - Drs. Usman AK
5. Drs. H. Zainul Arifin - dr. Ibrahim H. Ahmad
6. H. Muchtar Achmad, SE, MM - dr. H. Irfan

Pilkada di kabupaten yang terletak paling timur di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 ini juga diikuti pasangan anggota aktif DPR-RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dari Partai Amanat Nasional, Najamuddin.

Wilayah pemilihan yang tersebar di empat belas kecamatan Kabupaten Bima ini merupakan kali pertama Bupati dan Wakil Bupati dipilih langsung oleh rakyat sejak Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945 dan juga setelah era reformasi Indonesia Mei 1998.

Ferry Zulkarnain kelahiran Jakarta ini saat mengikuti calon Bupati Bima berpasangan dengan seorang birokrat pemerintah kabupaten Bima merupakan Ketua DPRD Kota Bima dari Partai Golongan Karya Pasangan Ferry Zulkarnain, dengan Usman AK memperoleh suara tertinggi dari lima pasangan calon lainnya. Hasil perolehan suara Pemilu Kada menempatkan Ferry Zulkarnain dan Usman AK berhak menyandang orang nomor satu dan dua terbaik di kabupaten Bima selama lima tahun.

Sementara pasangan calon *incumbent*, Drs. H. Zainul Arifin memperoleh suara terbanyak kedua dan pasangan calon nomor urut 6, H. Muchtar Achmad, SE, MM - dr. H. Irfan berada di urutan ke tiga.[[4]](#footnote-5) Selama itu pula H. Ferry Zulkarnain selaku bupati Kabupaten Bima terus bekerja memoles kabupaten tersebut hingga nampak seperti sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa H. Ferry Zulkarnain memiliki peran yang sangat penting pada perkembangan Kabupaten Bima. Namun, bagi H. Ferry Zulkarnain, segala prestasi yang didapatkan bukanlah atas usaha individualnya. Tetapi, merupakan kerjasama dari semua pihak dari staf pemerintahan Kabupaten Bima sampai masyarakat Bima. Dengan kata lain, keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pemimpin dan kerja sama masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dicapai suatu daerah. H. Ferry Zulkarnain percaya dengan modal sosial seperti komunikasi yang intens merupakan kunci keberhasilan. H. Ferry Zulkarnain dalam menjalankan perannya sebagai Bupati Kabupaten Bima terus membangun dan membenahi semua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bima. Dengan kata lain, perkembangan Kabupaten Bima mengacu pada keberhasilan pembangunan Kabupaten Bima/ Hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian tentang “ *Bima Pada Masa Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain (2005-2010)”.*

Ferry Zulkarnain yang hanya memiliki satu orang putera hasil perkawinannya dengan Dae Dinda lebih dikenal oleh masyarakat Bima dengan sapaan Dae Ferry. Suami dari Indah Damayanti Putri yang berasal dari daerah Dompu sebelum dicalonkan Partai Golongan Karya sebagai Bupati Bima merupakan anggota DPRD terpilih di daerah pemilihan legislatif Kabupaten Bima.[[5]](#footnote-6)

**B.  Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya diatas maka penjabaran permasalahan tersebut akan dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan Ekonom,Pendidikan,Kesehatan dan kehidupan keagamaan di awal pemerintahan H.Ferri Zulkarnain?
2. Bagaimana keadaan Bima pada masa Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain di Kabupaten Bima?

**C. Batasan Masalah**

Dari segi batasan tematik maka penelitian ini merupakan sejarah politik. Dalam memberikan uraian yang jelas dan tidak meluasnya masalah penulisan dalam proposal penelitian ini. Olehnya itu focus untuk mengetahui Bagaimana keadaan Bima pada masa Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain, Apa dampak yang terja di Bima pada masa pemerintahan H. Ferry Zulkarnain, dan Bagaimana keadaan Bima diawal pemerintahan H.Ferry Zulkarnain 2005-2010.

Batasan awal dalam penulisan proposal ini dimulai Dari segi batasan temporal penelitian ini akan berfokus pada tahun 2005-2010. Peneliti memulai tahun 2005 karena merupakan tahap awal mulainya pemerintahan H. Ferry Zulkarnain dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan kabupaten Bima. Sedangkan tahun 2010 saya ambil sebagai batasan akhir karena pada tahun ini masyarakat bisa menilai program-program apa saja yang sudah dilaksanakan atau masih ada program kerja yang belum dilaksanakan dalam pemerintahan H. Ferry Zulkarnain selama periodenya.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui keadaan ekonomi,pendidikan, kesehatan dan kehidupan keagamaan bima pada awal masa pemerintahan H.Ferry Zulkarnain
2. Mengetahui keadaan Bima pada masa Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain

**E. Manfaat Penelitian**

 Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi serta bahan acuan bagi siapa saja yang berminat untuk mengetahui perkembangan Kabupaten Bima pada masa Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain, St
2. Memperkaya pengetahuan dan khasanah penulisan sejarah daerah, khususnya di Bima ( Nusa Tenggara Barat ).
3. Sebagai bahan referensi sejarah lokal bagi penelitian selanjutnya.[[6]](#footnote-7)

**F. Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Salah satu kegiatan dalam penulisan karya Ilmiah yang patut dilakukan adalah proses kegiatan tinjauan pustaka. Kegiatan tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai telaan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab ada kesan yang menganggap bahwa apa yang ditulis seakan-akan belum ada orang lain yang lebih dulu menulisnya. Padahal penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoritis atau kajian metodologi. Tinjauan pustaka sendiri bertujuan sebagi pendukung, penguat, maupun pembenaran terhadap data yang telah ditemukan

Pada dasarnya penelitian tentang Pemerintan sudah ada beberapa orang yang telah menelitinya, baik berupa karya dalam bentuk artikel, maupun media massa dan media sosial

Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan sebuah daerah pada masa pemerintahan seorang kepala daerah ada banyak kajian relevan yang dapat dijadikan referensi antara lain :

Pertama Kabupaten Luwu Timur dalam “Luwu Timur pada Masa Pemerintahan Andi Hatta Marakarma (2003-2013)” skripsi oleh Halima Tussadiah yang isinya membahas mengenai perkembangan-perkembangan Kabupaten Luwu Timur pada periode kepemimpinan Andi Hatta Marakarma dalam kurun waktu 2003-2013 yang terdiri pada 2 masa pemerintahan.

Kedua Kabupaten Jeneponto dalam “ Jeneponto Masa Pemerintahan H. Radjamilo (2003-2013)” Skripsi oleh Nursyamsi Irsan yang isinya membahas perkembangan-perkembangan kabupaten jeneponto dalam periode H. Radjamilo 2003-2013.

Ketiga Kabupaten Pangkep dalam “ Pangkep : Studi Tentang Pemerintahan H. Syafrudin Nur (2005-2010)” Skripsi oleh Hastutiyang isinya membahas perkembangan-perkembangan kabupaten jeneponto dalam periode kepemimpinan H. Syafrudin Nur 2005-2010.

**G. Metode Penelitian**

 Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasikan terkait dengan Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain pada tahun 2005-2010. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan serta menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau sehingga jelas diarahkan kepada metode penelitian sejarah yang bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah kesenian dan sejarah sosial. Karena dalam penelitian ini akan di jelaskan tentang bagaimana peranan H.Ferry Zulkarnain dalam menjalankan Pemerintahanya di Kabupaten Bima.

Dimana dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat cara yang digunakan untuk menyususn karya ilmiah tersebut. Hal ini sering disebut sebagai metode. Metode berbeda dengan metodologi. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (external/bahan dan internal/isi), interpretasi(penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).[[8]](#footnote-9)

1.  Heuristik (pelacakan dan pengumpulan sumber)

Pengumpulan sumber atau dalam kajian sejarah akan lebih dikenal dengan heuristik. Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip).[[9]](#footnote-10)

Dalam melakukan pengumpulan sumber, penulis menempuh dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian pustaka

Merupakan langkah pengumpulan sumber dengan jalan mencari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul yang akan dikaji. Kajian pustaka ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan Pemerintahan yang dapat diperoleh dari Perpustakaan ataupun di balai Arsip.

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan sumber secara langsung di lapangan atau lokasi terkait judul tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mendatangi langsung dilokasi khususnya mereka yang ikut berperang aktif dalam pemerintahan yang ingin di kaji. Dalam penelitian lapangan penulis menempuh dua cara yaitu obsevasi dan wawancara.

2.  Verifikasi (kritik sejarah)

Proses ini sebagai bagian dari penafsiran dan pengkajian sumber. Sebagai seorang peneliti, seorang sejarawan haruslah bersikap curiga, sangsi dan berhati-hati tentang cerita atau keterangan sumber sebelum menerima dan mempercayai kebenaran. Dalam melakukan kritik sumber sejrah terdapat dua hal penting yang harus dilakukan, yakni kritik otentisitas (kritik ekstern) dan kritik kredibilitas (kritik intern).

Kritik ekstern adalah langkah-langkah meneliti atau menguji apakah dokumen-dokumen atau sumber-sumber sejarah yang didapatkan otentik atau asli, utuh, atau sudah banyak perubahan, bahkan mungkin palsu. Sedangkan kritik intern adalah penekanan dalam isi dari sumber. Kritik intern ini juga menguji kredibilitas suatu sumber.

3.  Interpretasi (penafsiran sejarah)

Tahapan ini merupakan tahapan setelah kritik sumber. Sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan sifatnya masih bisu. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan oleh sejarawan atau peneliti. Berdasarkan hal itu, maka seorang peneliti akan menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya.

4.   Penulisan (historiografi)

Dalam kaitannya dengan historiografi , yaitu proses penulisan sejarah banyak aspek yang terkait didalamnya. Menurut Hexter, proses pengumpulan bukti-bukti sejarah, pengeditan sumber sejarah, penggunaan pemikiran dan imajinasi sejarah, dan sebagainya merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari historiografi.[[10]](#footnote-11)

Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian urutan kejadian merupakan kunci pokok dalam penulisan sejarah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis akan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dimana dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan kajian kepustakaan dan lapangan (wawancara). Sebagaimana dengan laporan karya penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan).

Sehingga, penulisan tersebut dapat dikatakan menentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri. Dalam konteks ini sejarawan tidak hanya menjawab pertanyaan “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “bagaimana” tetapi melakukan eksplanasi secara kritis tentang “ bagaimana”, dan “mengapa”. [[11]](#footnote-12) Pada tahap ini fakta-fakta yang telah didapatkan penulis setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Berupa sebuah kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis itu sendiri.

Penulisan sejarah merupakan proses penjelasan dari semua kegiatan dalam proses penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini pada penelitian tentang Pemerintahan H. Ferry Zulkarnain 2005-2010. Peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana keadaan Kabupaten Bima dalam Pemerintahanya.

1. Soleman. *Struktur dan Proses Sosial*. (Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1 1984), hlm 159 [↑](#footnote-ref-2)
2. Umar Tirtarahardja, La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: Badan Penerbit UNM, 2010), hlm 302 [↑](#footnote-ref-3)
3. Salahuddin, Siti Maryam.2014 *Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan Bima.Bima: Yayasan Musium Kebudayaan SAMPARAJA Bima.* [↑](#footnote-ref-4)
4. [http://newsternet.blogspot.ie/2012/04/*bima-nusa-tenggara-barat-ferry*.html](http://newsternet.blogspot.ie/2012/04/bima-nusa-tenggara-barat-ferry.html),( Makassar diakses tanggal 04 Mei 2015). [↑](#footnote-ref-5)
5. Halima,Tussadiah, 2014. Luwu Timur Pada Masa Pemerintahan Andi Hatta Marakarma 2003-2013, (FIS, UNM, SKRIPSI). Hal: 4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Nursyamsi,Irsan, 2014. Jeneponto Masa Pemerintahan H. Radjamilo 2003-2013, (FIS, UNM,SKRIPSI). Hal; 6 [↑](#footnote-ref-7)
7. Saleh Madjid, Muhammad dan Rahman Hamid, Abdul, *pengantar ilmu sejarah* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), hlm.46 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*.,hlm 48 [↑](#footnote-ref-9)
9. Rahman Hamid, Abdul dan Saleh Madjid, Muhammad. *pengantar ilmu sejarah*.(Makassar: Ombak, 2011), hlm.43 [↑](#footnote-ref-10)
10. Hariyono*. Mempelajari sejarah secara efektif,(Malang*, Pustaka Jaya, 1995). Hlm. 103 [↑](#footnote-ref-11)
11. Saleh Madjid, Muhammad dan Rahman Hamid, Abdul, *pengantar ilmu sejarah* (Makassar : Rayhan Intermedia, 2008), hlm.59 [↑](#footnote-ref-12)